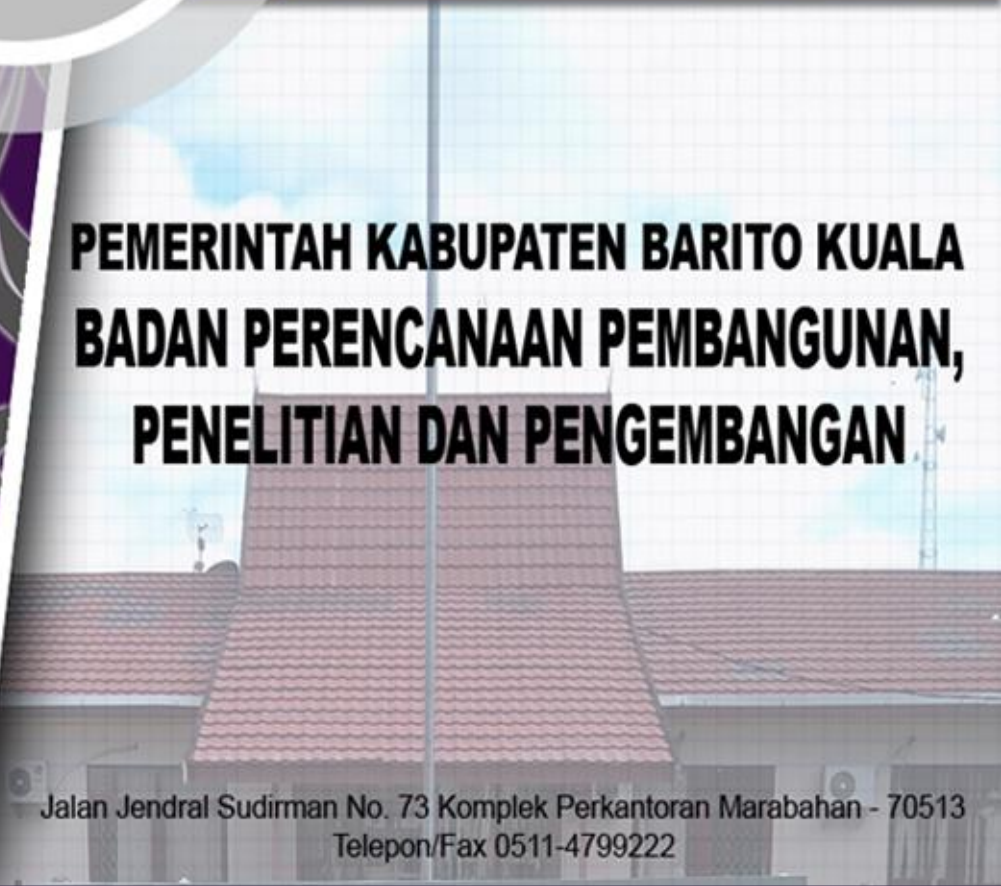


**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2023 – 2026
(REVISI KEDUA)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jendral Sudirman No. 73 Komplek Perkantoran Marabahan - 70513
Telepon/Fax 0511-4799222



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Dokumen ***Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi Kedua*** Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 ini dapat disusun sesuai dengan hasil evaluasi bersama Tim Sakip Kabupaten Barito Kuala.

Dokumen Rencana Strategis Revisi Kedua ini memberikan gambaran tentang program-program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala selama empat tahun mendatang yang lebih tajam dan menantang dalam rangka mewujudkan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026 Kabupaten Barito Kuala, dimana revisi ditekankan pada Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Utama.

Penyusunan Rencana Strategis Revisi Kedua ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

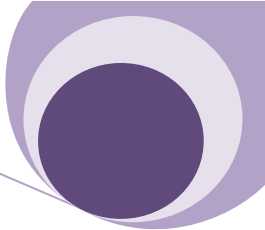
Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan perbaikan Dokumen Renstra Revisi Kedua ini. Akhirnya, semoga Dokumen Renstra Bappelitbang Tahun 2023 - 2026 Revisi Kedua ini memberikan manfaat, sebagai arahan/pedoman melaksanakan tugas bagi aparatur Bappelitbang dan dasar untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Marabahan, 09 Juni 2023

Kepala Bappelitbang

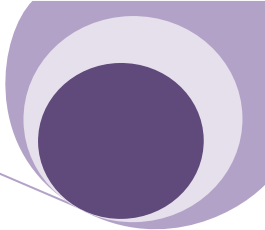
MUNADI, ST.

NIP. 19690716 199806 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sitematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANG	6
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbang	6
	2.1.1. Tugas	6
	2.1.2 Fungsi	6
	2.1.3 Struktur Organisasi	7
	2.2. Sumber Daya Bappelitbang	8
	2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
	2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan	8
	2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	9
	2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi	10
	2.2.5. Fasilitas Perlengkapan	11
	2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbang	11
BAB III	PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS BAPPELITBANG	17
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbang	17
	3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis	17
	3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal	22
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26
	3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga	27



	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
	3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbang	29
	3.5.1. Tantangan	29
	3.5.2. Peluang	30
	3.6. Penentuan isu-isu Strategis	30
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	32
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
	5.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis	37
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII	PENUTUP	65
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Tabel	2.2.	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan	9
Tabel	2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	10
Tabel	2.4.	Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf	11
Tabel	2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbang Barito Kuala	14
Tabel	2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbang Barito Kuala	15
Tabel	3.1.	Matriks Kekuatan Bappelitbang	18
Tabel	3.2.	Matriks Kelemahan Bappelitbang	19
Tabel	3.3.	Matriks Peluang Bappelitbang	20
Tabel	3.4.	Matriks Ancaman Bappelitbang	21
Tabel	3.5.	Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis Bappelitbang	22
Tabel	3.6.	Analisa Lingkungan Strategis Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala	23
Tabel	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022	34
Tabel	4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026 (Revisi Pertama)	34
Tabel	4.3.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026 (Revisi Kedua)	35
Tabel	5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	38
Tabel	5.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Revisi Pertama)	38
Tabel	5.3.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Revisi Kedua)	39
Tabel	6.1.	Pemuktahiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	41
Tabel	6.2.	Pemuktahiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	47
Tabel	6.3.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasran dan Pendanaan Indikator	55
Tabel	7.1.	Indikator Kinerja Bappelitbang yang Mengacu Pada Tujuan RPD	63
Tabel	7.2.	Indikator Kinerja Bappelitbang yang Mengacu Pada Sasaran RPD	63
Tabel	7.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026	64
Tabel	7.4.	Tujuan, Sasran dan Indikator Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Bagan SOTK Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Perbub Nomor 105 Tahun 2021	7
-------------	--	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik merupakan keinginan yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu instansi pemerintah daerah dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, maupun nasional.

Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas. Rencana Strategis Revisi ini merupakan suatu dokumen yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam ukuran waktu empat tahun, dengan tetap memperhatikan potensi



yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Revisi Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;



12. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
13. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Inmendagri 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
15. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031;
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Revisi Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua karyawan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2023 - 2026;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan selama empat tahun (masa transisi) dan rencana kerja tahunan;



4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang):

1. Memenuhi kebutuhan perubahan dalam lingkungan pemerintah yang semakin kompleks dan dinamis;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan pada masa depan;
5. Memudahkan/meningkatkan komunikasi para pemangku kepentingan untuk menghadapi masa depan;
6. Meningkatkan pelayanan secara optimal dan berkualitas;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Revisi Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 disusun dengan sistematika mengacu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Bappelitbang

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Bappelitbang
 - 2.1.1. Tugas
 - 2.1.2. Fungsi
 - 2.1.3. Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Bappelitbang
 - 2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - 2.2.2. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan



- 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
- 2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi
- 2.2.5. Fasilitas Perlengkapan

2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbang

BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappelitbang

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbang
 - 3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis
 - 3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal
- 3.2. Telaahan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2023 - 2026
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbang
 - 3.5.1. Tantangan
 - 3.5.2. Peluang
- 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII : Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbang

Bappelitbang sebagai instansi pemerintah daerah yang bertugas untuk melayani, proses perencanaan, mengawal, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD mengacu pada peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala

2.1.1. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Penelitian dan Pengembangan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Penelitian dan Pengembangan kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Penelitian dan Pengembangan kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- 
5. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

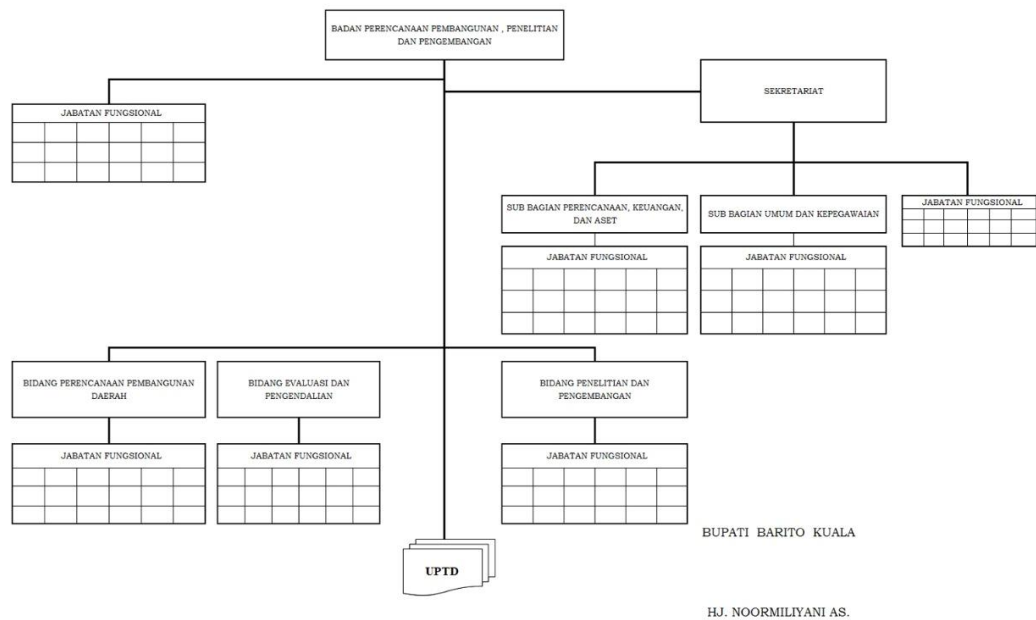
2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) setelah penyetaraan jabatan fungsional terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris Bappelitbang dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
3. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibantu oleh Jabatan Fungsional (Perencana dan Analis Pembangunan).
 - b. Bidang Evaluasi dan Pengendalian yang dibantu oleh Jabatan Fungsional (Perencana dan Analis Anggaran).
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dibantu oleh Jabatan Fungsional (Perencana dan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan).
4. Kelompok Jabatan Fungsional hingga saat ini belum terisi meskipun secara struktur organisasi posisi ini tersedia.

Gambar 2.1.

Bagan SOTK Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
Perbup Nomor 105 Tahun 2021



2.2. Sumber Daya Bappelitbang

2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala berjumlah 24 orang, yang terdiri dari 15 orang laki - laki dan 9 orang perempuan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1	Strata 3	- Orang Pria	0.00%
		- Orang Wanita	0.00%
2	Strata 2	5 Orang Pria	18.52%
		1 Orang Wanita	3.70%
3	Strata 1	8 Orang Pria	29.63%
		6 Orang Wanita	22.22%
4	Strata D III	- Orang Pria	0.00%
		2 Orang Wanita	7.41%
5	SLTA	2 Orang Pria	7.41%
		- Orang Wanita	0.00%
Jumlah		15 Orang Pria	55.56%
		9 Orang Wanita	33.33%

2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Keadaan pegawai di Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

1	Diklat Pim II	0 Orang Pria	0.00%
		- Orang Wanita	0.00%
2	Diklat Pim III	1 Orang Pria	10.00%
		1 Orang Wanita	0.00%
3	Diklat Pim IV	2 Orang Pria	20.00%
		3 Orang Wanita	30.00%
Jumlah		3 Orang Pria	30.00%
		3 Orang Wanita	30.00%

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara umum sebagian besar pegawai di Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala adalah Golongan IV (empat) berjumlah 4 orang (14,81%), Golongan III (tiga) berjumlah 21 orang (77,77%), dan yang paling sedikit adalah Golongan II (dua) yang berjumlah 2 orang (7,40%). Secara rinci keadaan pegawai berdasarkan golongan sebagaimana pada tabel berikut.



Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)		Persentase
1	Pembina Utama Muda (IV/C)	1	Orang Pria	4.17%
		0	Orang Wanita	0.00%
2	Pembina TK.I (IV/B)	1	Orang Pria	4.17%
		0	Orang Wanita	0.00%
3	Pembina (IV/A)	2	Orang Pria	8.33%
		2	Orang Wanita	8.33%
4	Penata TK.I (III/D)	2	Orang Pria	8.33%
		3	Orang Wanita	12.50%
5	Penata (III/C)	4	Orang Pria	16.67%
		0	Orang Wanita	0.00%
6	Penata Muda TK.I (III/B)	0	Orang Pria	0.00%
		0	Orang Wanita	0.00%
7	Penata Muda (III/A)	4	Orang Pria	16.67%
		4	Orang Wanita	16.67%
8	Pengatur TK.I (II/D)	1	Orang Pria	4.17%
		0	Orang Wanita	0.00%
9	Pengatur (II/C)	0	Orang Pria	0.00%
		0	Orang Wanita	0.00%
10	Pengatur Muda TK.I (II/B)	0	Orang Pria	0.00%
		0	Orang Wanita	0.00%
Jumlah		15	Orang Pria	62.50%
		9	Orang Wanita	37.50%

2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi

Menduduki jabatan Struktural dan fungsional (Fungsional Umum dan Penyetaraan) di Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan Esselon	Jumlah (orang)	Persentase
1	Esselon II.a	1 Orang Pria	4.17%
		0 Orang Wanita	0.00%
2	Esselon III.a	1 Orang Pria	4.17%
		0 Orang Wanita	0.00%
3	Esselon III.b	2 Orang Pria	8.33%
		1 Orang Wanita	0.00%
4	Esselon IV.a	2 Orang Pria	0.00%
		0 Orang Wanita	0.00%
5	Fungsional Perencana	6 Orang Pria	25.00%
		3 Orang Wanita	0.00%
6	Non Struktural / Fungsional Umum	3 Orang Pria	12.50%
		5 Orang Wanita	0.00%
Jumlah		15 Orang Pria	62.50%
		9 Orang Wanita	37.50%

2.2.5. Fasilitas Perlengkapan

Fasilitas atau perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Bappelitbang berupa:

1. Peralatan kantor dan mesin memadai,
2. Gedung dan bangunan semi permanen,
3. Jaringan listrik, air, telepon dan internet yang memadai,
4. Aset tetap lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbang

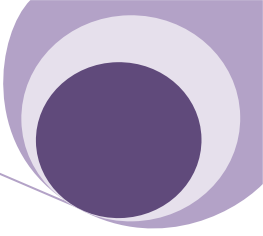
Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka selama kurun waktu Tahun 2017 - 2022 Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala telah menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan daerah yang diamanatkan oleh peraturan Perundangan-Undangan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (Peraturan Daerah Kab. Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018);
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala yang disusun setiap tahun (Murni dan Perubahan Tahun 2018 s/d 2022)

- 
- a. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan RKPD Tahun 2017
 - b. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 Tentang RKPD Tahun 2019
 - c. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan RKPD Tahun 2018
 - d. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Tentang RKPD Tahun 2020
 - e. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan RKPD Tahun 2019
 - f. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Tentang RKPD Tahun 2021
 - g. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Perubahan RKPD Tahun 2021
 - h. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 Tentang RKPD Tahun 2022
 - i. Proses Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 dan RKPD 2023
3. Laporan Capaian Kinerja SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan 2017 s/d 2022)
 4. Laporan hasil kelitbang (Laporan Kerjasama Penelitian dan Diseminasi Hasil Penelitian)
 - a. Penelitian Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Sesuai Karakteristik Kab. Barito Kuala Dalam Rangka Meningkatkan Status Desa Di Kab. Barito Kuala Tahun 2018
 - b. Penelitian Implementasi Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Dalam Upaya Penurunan Angka Kemiskinan Pedesaan Di Kab. Barito Kuala Tahun 2018
 - c. Penelitian Kajian Potensi Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019
 - d. Kajian Penjabaran Konsep Menata Kota Kabupaten Barito Kuala tahun 2019
 - e. Penelitian Kajian Pola Konsumsi Pangan, Integrasi Usaha Tanaman Pangan dan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020
 - f. Penelitian / Kerjasama program rehabilitasi usaha jamur konsumsi pasca banjir dan pengembangan menuju kemandirian UMKM Tahun 2021
 5. Dokumen Renstra, Renja, dan LKIP Bappelitbang 2018 s/d 2022
 6. Laporan Keuangan Bappelitbang 2018 s/d 2022
 7. Laporan Kepegawaian 2018 s/d 2022

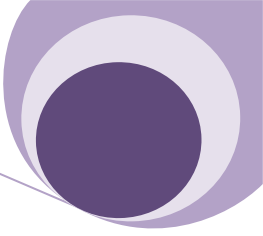


8. Laporan Koordinasi terkait SDGs, Kemiskinan, Stunting, BKT, PATEN, PLUD, KLA, Kebencanaan, Tata Ruang (ditahun 2020 serahkan kewenangannya ke Dinas PUPR), Menata Kota, dll.



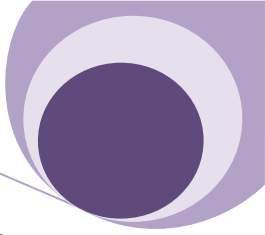
Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator kinerja Sesuai Tupoksi Bappelitbang	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Terwujudnya Perencanaan Daerah yang berkualitas. (2018 – 2019)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan (2020 – 2022)	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	1	1



Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbang
Kabupaten Barito Kuala

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari unsur perencanaan kinerja (2018 - 2019)	1.461.935,80	2.121.769,15	1.943.780,92	-	-	1.241.371,93	1.806.170,28	1.769.665,15			84,91	85,12	91,04			1.805.458,9	5,40 %
2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW (2018 – 2019)	-	962.035,0	728.224,5	-		-	816.117,6	652.240,2			-	-	-				
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan Kinerja. (2020 – sekarang)				951.249,7	1.528.300,0				861.408,0	1.272.430,7							
	1.461.935,80	3.083.804,15	2.672.005,42	951.249,7	1.528.300,0	1.241.371,93	2.622.287,88	2.421.905,35	861.408,0	1.272.430,7	84,91	85,12	91,04	89,91	85,92	1.805.458,9	5,40 %



Dari Tabel 2.5. Pencapaian kinerja pelayanan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala selama periode Renstra Tahun 2017 - 2022 telah tercapai secara maksimal. Keberhasilan Bappelitbang mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan menyelaraskan Dokumen RKPD dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala, dan menyelaraskan Dokumen Renja dengan Renstra SKPD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbang

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagai institusi perencana dituntut untuk dapat menjabarkan arah strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Perencanaan awal yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Barito Kuala kedepan. Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan Bappelitbang memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan.

3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis

Rencana Strategis Revisi Kedua Bappelitbang Tahun 2023 - 2026 disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbang Tahun 2023 - 2026 secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya visi dan misi RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026.

3.1.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal

Analisa lingkungan internal Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana; serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bappelitbang dalam empat tahun mendatang (2023 - 2026).

Analisa lingkungan internal di Bappelitbang meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, meliputi:

1. **Kekuatan (Potensi)** yang dimiliki di Bappelitbang ,
yaitu:

- a. Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai;
- b. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
- c. Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;
- d. Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan.

Tabel 3.1
Matriks Kekuatan Bappelitbang

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai;	25	4	1,00
2	Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;	15	3	0,45
3	Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;	25	4	1,00
4	Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan.	35	4	1,45
	TOTAL	100		3,90

Catatan :

Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

- 2. **Kelemahan (kendala)** yang ada di Bappelitbang, yaitu:
 - a. Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
 - b. Belum terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan;
 - c. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan desa dan kecamatan;

- d. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang sumberdaya desa dan kecamatan;
- e. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.

Tabel 3.2.
Matriks Kelemahan Bappelitbang

No	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;	20	3	0,60
2	Belum terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan;	25	4	1,00
3	Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan desa dan kecamatan;	20	4	0,80
4	Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang sumberdaya desa dan kecamatan;	20	4	0,80
5	Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik	15	4	0,60
	TOTAL	100		3,80

Catatan:

Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

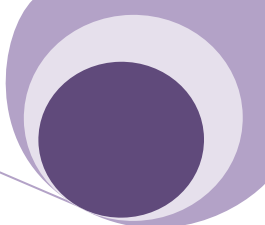
3.1.1.2. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

Identifikasi dan analisa lingkungan eksternal Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Bappelitbang dalam empat tahun mendatang (2023 – 2026). Dari hasil identifikasi dan analisa lingkungan eksternal, peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh Bappelitbang dalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut:

- 1. **Peluang**, yang tersedia bagi Bappelitbang, yaitu:
 - a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bappelitbang dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Adanya dukungan yang kuat dari Bupati/Wakil Bupati terhadap Bappelitbang;
 - c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Bappelitbang;
 - d. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappelitbang dalam perencanaan pembangunan;
 - e. Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.

Tabel 3.3.
Matriks Peluang Bappelitbang

No	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bappelitbang dalam perencanaan pembangunan daerah;	15	3	0,45
2	Adanya dukungan yang kuat dari Bupati/Wakil Bupati terhadap Bappelitbang;	25	4	1,00



3	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Bappelitbang;	30	4	1,20
4	Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappelitbang dalam perencanaan pembangunan;	20	4	0,80
5	Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.	10	3	0,30
	TOTAL	100		3,75

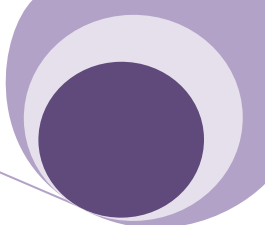
Catatan:

Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

2. **Tantangan**, yang dihadapi Bappelitbang antara lain, yaitu:
- a. Lemahnya koordinasi antar SKPD;
 - b. Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel;
 - c. Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran;
 - d. Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.4.
Matriks Ancaman Bappelitbang

No	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Lemahnya koordinasi antar SKPD;	30	4	1,20
2	Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel;	20	4	0,80



3	Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran;	25	4	0,80
4	Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.	25	4	0,80
	TOTAL	100		3,60

Catatan:
Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

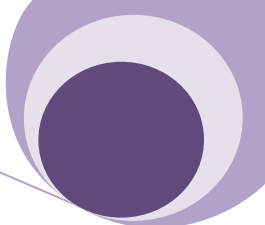
3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal

Berdasarkan hasil identiifikasi lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan Bappelitbang, serta identifikasi lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman, maka keseimbangan lingkungan strategis Bappelitbang menunjukkan bahwa Bappelitbang masih memiliki keseimbangan yang positif, yaitu 0,10 untuk lingkungan internal dan 0,15 untuk lingkungan eksternal. Kondisi ini menyiratkan bahwa Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala masih harus terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 3.5.
Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis Bappelitbang

Indikator	Skor Tetrimbang	Indikator	Skor Tertimbang
1. Kekuatan	3,90	1. Peluang	3,75
2. Kelemahan	3,80	2. Ancaman	3,60
KESEIMBANGAN	0,10	KESEIMBANGAN	0,15

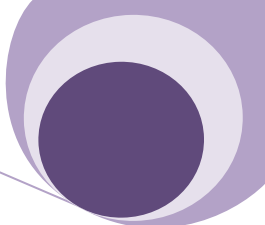
Berdasarkan matriks keseimbangan lingkungan strategis Bappelitbang tersebut, dalam tahun 2023 - 2026 strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan ditempuh oleh Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala diprioritaskan untuk menjaga dan memantapkan kinerja kinerja yang telah dicapai selama ini.



Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6.
Analisa Lingkungan Strategis Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala

Eksternal Internal	Peluang: 1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bappelitbang dalam perencanaan pembangunan daerah; 2) Adanya dukungan yang kuat dari Bupati / Wakil Bupati terhadap Bappelitbang ; 3) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam perencanaan berbasis kinerja; 4) Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappelitbang dalam perencanaan pembangunan; 5) Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.	Ancaman: 1) Lemahnya koordinasi antar SKPD; 2) Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel; 3) Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran; 4) Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
Kekuatan: 1) Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai; 2) Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai; 3) Tingginya motivasi sumberdaya manusia dalam meningkatkan kinerja; 4) Berkembangnya pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan;	Keterkaitan S – O 1) Pengembangan SDM dan yang didukung apresiasi pemangku kepentingan meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah; 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi informasi memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; 3) Ketersediaan sarana prasarana dan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya yang dinamis menjadikan pelaksanaan rencana pembangunan semakin efektif dan efisien.	Keterkaitan S – T 1) Perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat secara optimal; 2) Peningkatan prasarana dan sarana dalam pengembangan sistem informasi memperkuat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; 3) Peningkatan pengetahuan dan pengalaman dan peningkatan sinergi antar SKPD menjadikan proses perencanaan menjadi semakin efektif dan bermutu.

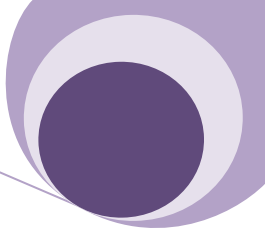


Kelemahan: 1) Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; 2) Belum terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan; 3) Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan desa dan kecamatan; 4) Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang sumberdaya desa dan kecamatan; 5) Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik	Keterkaitan W – O 1) Pelaksanaan manajemen berbasis kinerja, dukungan pimpinan daerah, komitmen para pemangku kepentingan dan kemampuan komunikasi publik yang andal meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. 2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus; serta pemahaman terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperkuat perencanaan berbasis desa dan kecamatan; 3) Pengembangan data dasar dan informasi wilayah desa dan kecamatan yang akurat, lengkap dan terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan mutu dan kinerja perencanaan; 4) Penataan dan peningkatan efektivitas Musrenbang sebagai forum koordinasi dan komunikasi para pemangku kepentingan dengan memperhatikan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperlancar percepatan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah.	Keterkaitan W – T 1) Penataan manajemen kinerja dan peningkatan koordinasi antar SKPD menjadikan perencanaan lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel; 2) Peningkatan kapasitas teknis perencanaan dan penganggaran; serta penataan manajemen kinerja akan mendorong optimalisasi pengelolaan sumberdaya daerah; 3) Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi publik; serta penguatan koordinasi antar SKPD memperkuat mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. 4) Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2016

1. Keterkaitan Potensi - Peluang (S-O)

- a. Pengembangan SDM yang didukung apresiasi pemangku kepentingan meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi informasi menunjang perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;

- 
- c. Ketersediaan sarana prasarana dan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya yang dinamis menjadikan pelaksanaan rencana pembangunan semakin efektif dan efisien.

2. Keterkaitan Potensi – Ancaman (S – T)

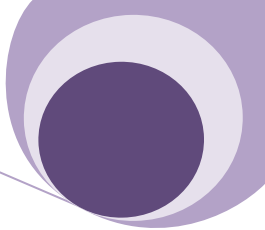
- a. Perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat secara optimal;
- b. Peningkatan prasarana dan sarana dalam pengembangan sistem informasi memperkuat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. Peningkatan pengetahuan dan pengalaman dan peningkatan sinergi antar SKPD menjadikan proses perencanaan menjadi semakin efektif dan bermutu.

3. Keterkaitan Kelemahan – Peluang (W – O)

- a. Pelaksanaan manajemen berbasis kinerja, dukungan pimpinan daerah, komitmen para pemangku kepentingan dan kemampuan komunikasi publik yang andal meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan;
- b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus; serta pemahaman terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperkuat perencanaan berbasis desa dan kecamatan;
- c. Pengembangan data dasar dan informasi wilayah desa dan kecamatan yang akurat, lengkap dan terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan mutu dan kinerja perencanaan;
- d. Penataan dan peningkatan efektivitas Musrenbang sebagai forum koordinasi dan komunikasi para pemangku kepentingan dengan memperhatikan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperlancar percepatan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

4. Keterkaitan Kelemahan – Peluang (W – T)

- a. Penataan manajemen kinerja dan peningkatan koordinasi antar SKPD menjadikan perencanaan lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel;

- 
- b. Peningkatan kapasitas teknis perencanaan dan penganggaran; serta penataan manajemen kinerja akan mendorong optimalisasi pengelolaan sumberdaya daerah;

Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi publik; serta penguatan koordinasi antar SKPD memperkuat mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi & Misi Rencana Pembangunan Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2023 - 2026

Sesuai Inmendagri No. 70 Tahun 2021 dimana Kab. Barito Kuala tidak Menyusun RPJMD sehubungan dengan berakhirnya jabatan Bupati pada November 2022 dan Pilkada dilaksanakan Tahun 2024. Didalam peraturan tersebut diatur untuk daerah Menyusun Rencana pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 yang ditetapkan dengan peraturan bupati. RPD memuat visi misi yang disesuaikan dengan RPJPD Kab. Barito Kuala. Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025, maka telah ditetapkan visi Barito Kuala 2025 Yang Adil, Maju dan Mandiri Berbasis Agribisnis yang dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan local dengan mengoptimalkan pengelolaan SDA dan sumber daya lainnya untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan
2. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan
3. Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan IPTEK dan IMTAQ

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPD 2023 - 2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbang yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPD.



Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, maka Bappelitbang berkontribusi untuk mewujudkan Visi dan Misi ke 3 dalam RPD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

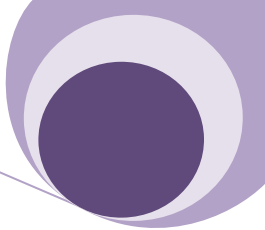
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang dihasilkan dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Kualitas rencana pembangunan nasional dijabarkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020 - 2024 adalah **“Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, dan Kredibel Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sejalan dengan itu, pengertian kata **berkualitas** dan **kredibel**. Terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. **Berkualitas**
 - a. Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kelembagaan/Lembaga dan Daerah dalam menyusun perencanaannya masing-masing; dan
 - b. Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good governance and clean government.
- 2. **Kredibel**
 - yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi dan data yang terkini (evidence based dan knowledge based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi :

- 
1. Menyelenggaraan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa yang bertujuan :
 - Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia
 - Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
 2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien yang bertujuan mewujudkan tata Kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil kajian KLHS, maka permasalahan pokok pada Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Struktur ruang wilayah belum terbentuk dengan baik, sehingga rencana struktur berusaha mengangkat permasalahan pembangunan dan pertumbuhan kota-kota tidak dalam bentuk spasial;
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Peraturan Zonasi) belum optimal : Lahan basah yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan pertanian/perikanan, perubahan kawasan lindung pantai (hutan mangrove) menjadi kawasan budidaya perikanan;
3. Degradasi sungai-sungai dan kanal, menyebabkan banjir tahunan di daerah hulu (Kecamatan Kuripan), air laut hingga ke daerah hulu (pada saat musim kemarau, hingga mencemari sumber air baku), Kualitas air permukaan dengan tingkat keasaman tinggi tidak dapat digunakan sebagai air baku untuk kepentingan air bersih dan air minum;
4. Kondisi permukaan tanah rawa, tidak memungkinkan pengolahan limbah domestik dengan baik, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan;
5. Pelayanan transportasi publik masih rendah;
6. Intensitas transportasi sungai yang tinggi di alur sungai barito, khususnya transportasi angkutan batu bara berpotensi menurunkan kualitas cagar alam Pulau Bakut, Pulau Kaget dan Pulau Kembang (limbah batu bara, bbm



kapal, penggerusan, pengaruh negative terhadap flora dan fauna yang di lindungi);

7. Kuantitas dan kualitas prasarana perkotaan masih relative rendah terutama pada persampahan, jaringan litrik, drainase, air bersih, limbah dan sanitasi;
8. Perlunya pengembangan dan perencanaan induk (masterplan) ekonomi pembangunan kabupaten barito kuala; untuk mengakomodasi isu globalisasi dan pasar terbuka, serta Persaingan ekonomi regional. Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang belum ada, angka pengangguran yang relative tinggi, dan potensi Kepariwisata belum berkembang secara optimal;
9. Penyebaran Penduduk yang tidak merata dan Pertumbuhan Penduduk rendah, bahkan cenderung berkurang di beberapa wilayah tertinggal, terjadinya proses migrasi keluar dan urbanisasi.

3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbang

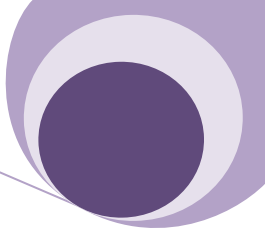
Keberhasilan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stakeholders baik itu SKPD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

3.5.1. Tantangan & Kelemahan

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala yaitu:

1. Belum optimalnya Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappelitbang baik oleh internal Bappelitbang maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

- 
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya
 4. Belum optimalnya penggunaan rumah data dalam menghimpun dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar;
 5. Belum terujinya dampak penyetaraan jabatan fungsional dilingkungan Bappelitbang;
 6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
 7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappelitbang dengan SKPD lain;
 8. Belum optimalnya SSH yang mendukung kegiatan perencanaan. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur.
 9. Sarana & Prasarana yang kurang memadai

3.5.2. Peluang / Kekuatan

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Dukungan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
2. Terbukanya peluang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM perencana.
3. Adanya penyetaraan jabatan fungsional perencana
4. Adanya aplikasi SIPD
5. Suasana kantor yang nyaman

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas, isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Bappelitbang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten
2. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Misi Bappelitbang adalah misi ke 3 RPD yaitu **"Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"**

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala **(Sebelum Revisi)** dalam empat tahun mendatang yaitu:

- a. Tujuan Bappelitbang adalah **"Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas"**, dengan Indikator **"Indeks Reformasi Birokrasi"** dan **"Nilai MCP Korsupgah KPK"**.
- b. Sasaran Bappelitbang adalah **"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan"**, dengan Indikator **"Nilai SAKIP Kabupaten Dari Unsur Perencanaan"**.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala **(Revisi Pertama)** dalam empat tahun mendatang yaitu:

- a. Tujuan Bappelitbang adalah :
 1. **"Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD."**, dengan Indikator **"Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu "**
 2. **"Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD"** dengan indicator **"Nilai Evaluasi SAKIP SKPD"**
 3. **"Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan"** dengan Indikator **"Nilai Sakip Kabupaten Yang Dicapai Dari Unsur Perencanaan Kinerja"**
 4. **"Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan"** dengan Indikator **"Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan"**
- b. Sasaran Bappelitbang adalah :
 1. **"Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD"**, dengan Indikator **"Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu".**
 2. **"Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD"** dengan Indicator **"Nilai Evaluasi SAKIP "**
 3. **"Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan"** dengan Indikator **"Nilai Sakip Kabupaten Yang Dicapai Dari Unsur Perencanaan Kinerja"**
 4. **"Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan"** dengan Indikator **"Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan"**



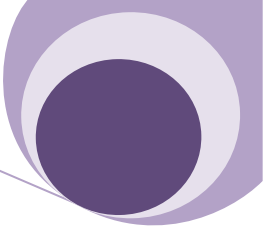
Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala **(Revisi Kedua)** dalam empat tahun mendatang yaitu:

a. Tujuan Bappelitbang adalah :

1. ***"Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten"***, dengan Indikator ***"Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala "***

b. Sasaran Bappelitbang adalah :

1. ***"Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten dari Komponen Perencanaan Kinerja"***, dengan Indikator ***"Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten"***.
2. ***"Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten dari Komponen Pengukuran Kinerja"*** dengan Indikator ***" Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Kabupaten"***
3. ***"Meningkatnya Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan"*** dengan Indikator ***" Persentase Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan"***
4. ***"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbang"*** dengan Indikator ***"Nilai Evaluasi Sakip Bappelitbang"***



Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026 (Sebelum Revisi)

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)			
							2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten Dari Unsur Perencanaan"	Nilai SAKIP Kabupaten x 30%	24,5	25,0	26,0	26,5

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026 (Revisi Pertama)

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)			
							2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	1	1	1	1
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Nilai Evaluasi Sakip Oleh Inspektorat	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Sakip SKPD	Hasil Evaluasi Oleh Inspektorat	79,05	79,08	80,00	80,03

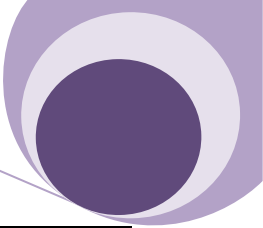


3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Nilai Sakip Kabupaten Yang Dicapai Dari Unsur Perencanaan Kinerja	<i>Nilai Evaluasi Sakip Oleh Kemenpan</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan</i>	<i>Nilai Sakip Kabupaten Yang Dicapai Dari Unsur Perencanaan Kinerja</i>	<i>Nilai SAKIP Kabupaten x 30%</i>	24,50	25,00	26,00	26,50
4	Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	<i>Rencana Kelitbangan Yang Diimplementasikan : Jumlah Rencana Kelitbangan X 100</i>	<i>Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan</i>	<i>Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan</i>	<i>Rencana Kelitbangan Yang Diimplementasikan : Jumlah Rencana Kelitbangan X 100</i>	100	100	100	100

Tabel 4.3.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026 (Revisi Kedua)

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Target Tujuan				Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)			
				2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
1.	<i>Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten</i>	Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	<i>Nilai Evaluasi Sakip Oleh Kemenpan</i>	70,94	72,94	74,94	74,94	Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten dari Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten	<i>Nilai Komponen Perencanaan Kinerja yang diberikan oleh KemenpanRB</i>	24,00	24,50	25,00	25,50
								Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten dari Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Kabupaten	<i>Nilai Komponen Pengukuran Kinerja yang diberikan oleh KemenpanRB</i>	22,00	23,00	24,00	25,00



								<i>Meningkatnya Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan</i>	<i>Persentase Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan</i>	<i>Jumlah Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan : Jumlah Kajian Yang Disusun x 100</i>	100	100	100	100
								Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bappelitbang	Nilai Evaluasi Sakip Bappelitbang	Penetapan Nilai SAKIP Oleh Inspektorat Kab. Barito Kuala	80,00	81,00	82,00	83,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Bappelitbang, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

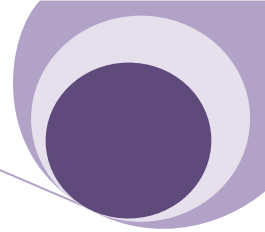
5.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis

Analisa lingkungan internal dan eksternal tentang kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman bagi Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun mendatang (2023 - 2026) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dilakukan untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang paling tepat dalam peningkatan kinerja Bappelitbang.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappelitbang. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappelitbang harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappelitbang yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakandan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal.

Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Bappelitbang Tahun 2023 - 2026 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

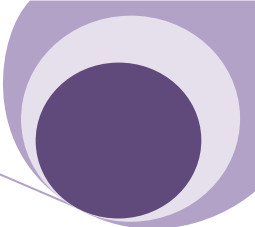


Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Barito Kuala Yang Adil, Maju dan Mandiri Berbasis Agribisnis			
MISI 3 : Memantapkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas</i>	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan</i>	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja	- Rakoor Perencanaan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat - Asistensi/Review Dokumen Perencanaan - Workshop dan Orientasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
		Meningkatkan Kualitas Kelitbangan Dalam Mendukung Capaian Indeks Inovasi Daerah	- Rakoor Kelitbangan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat - Penyusunan Dokumen Penelitian - Moneva Kelitbangan - Workshop, Ekspose dan Desiminasi Hasil Kelitbangan - Lomba Inovasi

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Revisi Pertama)

VISI : Barito Kuala Yang Adil, Maju dan Mandiri Berbasis Agribisnis			
MISI 3 : Memantapkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD</i>	<i>Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD</i>	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan SKPD	- Rakoor Penyusunan Laporan Keuangan - Review Laporan Keuangan - Workshop dan Orientasi Penyusunan Laporan Keuangan
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD	<i>Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD</i>	Meningkatkan Kualitas Dokumen Sakip SKPD	- Rakoor Penyusunan Dokumen Sakip SKPD - Review Dokumen Sakip SKPD
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	<i>Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan</i>	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan SKPD	- Rakoor Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Review Dokumen Perencanaan SKPD
Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan	<i>Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan</i>	Meningkatkan Kualitas Rencana Kelitbangan	- Rakoor Rencana Kelitbangan



Tabel 5.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Revisi Kedua)

VISI : Barito Kuala Yang Adil, Maju dan Mandiri Berbasis Agribisnis			
MISI 3 : Memantapkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten	<i>Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten dari Komponen Perencanaan Kinerja</i>	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan SKPD	- Rakoor Perencanaan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat - Asistensi/Review Dokumen Perencanaan - Workshop dan Orientasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
	<i>Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten dari Komponen Pengukuran Kinerja</i>	Meningkatkan Kualitas Dokumen Pengukuran SKPD	- Rakoor Pengukuran Kinerja SKPD - Asistensi/Review Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD
	Meningkatnya Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan	Meningkatkan Jumlah dan Kualitas Kajian Yang Dilaksanakan Di Kab. Barito Kuala	- Rakoor Kelitbangan dan Inovasi - Satu SKPD Satu Inovasi
	<i>Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bappelitbang</i>	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbang	- Rakoor Perencanaan dan Pengukuran Kinerja SKPD - Asistensi / Review Dokumen Sakip SKPD



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam empat tahun dan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Bappelitbang setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program , kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbang.

Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama, Bappelitbang menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam matriks dibawah ini.



Tabel 6.1
Pemutakhiran Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan
Sebelum Pemutakhiran (Kepmendagri. 050-3708 Tahun 2020)

1	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	• Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbang Dari Komponen Perencanaan Kinerja • Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbang Dari Komponen Pengukuran Kinerja • Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbang Dari Komponen Pelaporan Kinerja • Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbang Dari Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal • Persentase Perjanjian Kinerja Yang Tercapai	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbang	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhrisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Capaian Realisasi Kegiatan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Aset
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentasi peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah / Jenis Pembelian Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan (Jenis)
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman (Snack) Yang Disediakan (Porsi)



					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan Yang Disediakan
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar) Yang Disediakan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Yang Terlaksana (Kali)
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin (Buah)
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang		Penyediaan Jasa	



			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemerlihaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Pemerlihaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	• Persentasi Keselarasan Program Dalam Dokumen RKPD Dengan Program Dalam Dokumen RPD • Persentase Keselarasan Program Dokumen Renstra SKPD Dengan Program Dokumen RPD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen RKPD Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Bupati	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)



		Persentasi Hasil Evaluasi Yang Menjadi Input / Bahan Perencanaan	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Kegiatan Renja SKPD Dengan Renstra SKPD	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		Persentase Keselarasan Sub. Kegiatan Dokumen Renja SKPD dengan Dokumen RKPD			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah laporan Hasil Evaluasi Dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan



					Pembangunan Manusia	Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil



					Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase laporan pengelolaan data dan informasi serta penerapan aplikasi pembangunan daerah dalam mendukung penelitian dan pengembangan
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Kajian Inovasi dan Teknologi yang diterapkan
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang	Jumlah Inovasi Yang Diterapkan



					Bersifat Inovatif	
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	Jumlah Kajian Yang Didiseminasikan

Tabel 6.2.
Pemutakhiran Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan
Setelah Pemutakhiran (Kepmendagri. 050-5889 Tahun 2021)

	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Realisasi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Aset Dan Perencanaan / Pelaporan	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan



			Daerah		Perundang - Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah / Jenis Pembelian Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan
					Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan
					Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan
					Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan
					Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan



					Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan
					Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan



						Umum Kantor Yang Disediakan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Penyediaan Jasa Pemerliharan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya
					Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi
					Pemerliharan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Sakip Skpd Yang Dicapai Dari Unsur Perencanaan	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Rkpd Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Bupati	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan



					Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun
			Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SKPD
					Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sub. Kegiatan Baru Setelah 3 Sub. Dihapus
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.



						RPJMD Dan RKPD)
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan



			Kewilayahan		Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD Dan RKPD)
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD Dan RKPD)
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan		Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan Dan Peraturan Yang Terkelola Dengan Baik
			Pengembangan Inovasi		Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasa Di Bidang	Persentase Kajian Inovasi



			Dan Teknologi		Teknologi Dan Inovasi	Dan Teknologi Yang Diterapkan
					Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
					Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan



Tabel 6.3.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target / Pagu (Rp)		
							Target / Pagu (Rp)	Target / Pagu (Rp)	Target / Pagu (Rp)	Target / Pagu (Rp)	Target / Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbang	Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbang				100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala	Kab. Batola
						5,450,000,000	6,222,071,272	6,424,770,956	7,007,390,523	25,104,232,751			
			5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Realisasi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Aset dan Perencanaan / Pelaporan		27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen		
			14.801.010.440			3,700,252,610	3,700,252,610	3,700,252,610	3,700,252,610	14.801.010.440			
			5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi		27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen		Sekretariat	
						344.357.080	86,089,270	86,089,270	86,089,270	86,089,270	344.357.080		
			5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen		Sekretariat	
						344.357.080	86,089,270	86,089,270	86,089,270	86,089,270	344.357.080		
			5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan		100%	100%	100%	100%		Sekretariat	
						11.298.394.016	2,824,598,504	2,824,598,504	2,824,598,504	2,824,598,504	11.298.394.016		
			5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang		Sekretariat	
						11.298.394.016	2,824,598,504	2,824,598,504	2,824,598,504	2,824,598,504	11.298.394.016		
			5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian		100%	100%	100%	100%		Sekretariat	
						147,330,000	36,832,500	36,832,500	36,832,500	36,832,500	147,330,000		
			5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis		3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang		Sekretariat	



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
							Target / Pagu (Rp)	Target / Pagu (Rp)	Target / Pagu (Rp)	Target / Pagu (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				- Undangan	Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	Rp147,330,000	36,832,500	36,832,500	36,832,500	36,832,500	Rp147,330,000		Kab. Batola
			5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum		100%	100%	100%	100%		Sekretariat	
						1.376.767.920	344,191,980	344,191,980	344,191,980	344,191,980	1.376.767.920		
			5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket		Sekretariat	
						37,520,320	9,380,080	9,380,080	9,380,080	9,380,080	37,520,320		
			5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan		16 Paket	16 Paket	16 Paket	16 Paket		Sekretariat	
						403.565.200	100,891,300	100,891,300	100,891,300	100,891,300	403.565.200		
			5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan		2272 Paket	2272 Paket	2272 Paket	2272 Paket		Sekretariat	
						178,800,000	44,700,000	44,700,000	44,700,000	44,700,000	178,800,000		
			5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan		Lembar / Paket	Lembar / Paket	Lembar / Paket	Lembar / Paket		Sekretariat	
						127,023,000	31,755,750	31,755,750	31,755,750	31,755,750	127,023,000		
			5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan Yang Disediakan		48 Dokumen / Eks	48 Dokumen / Eks	48 Dokumen / Eks	48 Dokumen / Eks		Sekretariat	
						22,200,000	5,550,000	5,550,000	5,550,000	5,550,000	22,200,000		
			5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		37 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan		Sekretariat	
						607.659.400	151,914,850	151,914,850	151,914,850	151,914,850	607.659.400		
			5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	100%	100%	100%		Sekretariat	
						143,590,000	35,897,500	35,897,500	35,897,500	35,897,500	143,590,000		
			5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		Sekretariat	
80,800,000	20,200,000	20,200,000				20,200,000	20,200,000	80,800,000					



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
							Target / Pagu (Rp)	Target / Pagu (Rp)	Target / Pagu (Rp)	Target / Pagu (Rp)	Target / Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	62,790,000	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	62,790,000	Sekretariat	
			5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.137.824	100%	100%	100%	100%	757.137.824	Sekretariat	
												Sekretariat	
			5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21,984,000	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21,984,000	Sekretariat	
			5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	532.800.000	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	532.800.000	Sekretariat	
			5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	202.353.824	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	202.353.824	Sekretariat	
			5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	733,433,600	100%	100%	100%	100%	733,433,600	Sekretariat	
												Sekretariat	
			5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Rp436,400,000	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	Rp436,400,000	Sekretariat	
			5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Rp99,333,600	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	Rp99,333,600	Sekretariat	
			5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		Sekretariat	



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
							Terget / Pagu (Rp)	Terget / Pagu (Rp)	Terget / Pagu (Rp)	Terget / Pagu (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten dari Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan kabupaten yang di tetapkan		100%	100%	100%	100%			
						4.502.261.836	909.829.235	1.662.756.786	889.266.143	1.040.409.672	4.502.261.836		
			5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan SKPD Yang Ditetapkan		100%	100%	100%	100%		Bidang PPD	
						1.727.013.143	409.856.055	972.886.773	169,591,288	174,679,027	1.727.013.143		
			5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD)		2	4	2	2		Bidang PPD	
						1.727.013.143	409.856.055	972.886.773	169,591,288	174,679,027	1.727.013.143		
	Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten dari Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Kabupaten	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	100%	100%	100%		Bidang Evdal	
			5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		16	16	16	16		Bidang Evdal	
						1.219.050.350	127,999,710	306.737.339	325.048.201	459.265.100	1.219.050.350		
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		12	12	12	12		Bidang Evdal	
						1,556,198,343	371,973,470	383,132,674	394,626,654	406,465,545	1,556,198,343		
			5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Dikoordinir Penyusunannya	47 SKPD	100%	100%	100%	100%	47 SKPD	Bidang PPD dan Bidang Evdal	
				PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.543.255.367	371.000.000	431.197.557	360.619.611	371,438,199	1.543.255.367		
			5.01.03.2.01	Koordinasi	Persentase SKPD		100%	100%	100%	100%		Bidang PPD	



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
							Terget / Pagu (Rp)	Terget / Pagu (Rp)	Terget / Pagu (Rp)	Terget / Pagu (Rp)	Terget / Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Programnya Selaras Antara RPJMD dan RKPD	443.244.122	99,999,880	127.881.800	106.089.873	109,272,569	443.244.122	dan Bidang Evdal	
				5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembnagunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD / RPJMD / RKPD)	93	124	93	93		Bidang PPD	
							443.244.122	99,999,880	127.881.800	106.089.873	109,272,569		
				5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase SKPD Bidang Perekonomian dan SDA Yang Programnya Selaras Antara RPJMD dan RKPD	100%	100%	100%	100%		Bidang PPD dan Bidang Evdal	
							425.807.953	99,999,890	110.445.600	106,089,883	109,272,580		
				5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)	27	36	27	27		Bidang PPD	
							425.807.953	99,999,890	110.445.600	106,089,883	109,272,580		
				5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang Programnya Selaras Antara RPJMD dan RKPD	100%	100%	100%	100%		Bidang PPD	
							665.203.293	171.000.230	192.870.157	148,439,855	152,893,051		
				5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Yang Dikoordinir	12	16	12	12		Bidang PPD	
							439,208,040	136.064.030	108,132,078	111,376,040	114,717,322		



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Target / Pagu (Rp)	Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
							Target / Pagu (Rp)	Target / Pagu (Rp)	Target / Pagu (Rp)	Target / Pagu (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
			5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	8	6	6	6	8	Bidang PPD	
						194.913.823	34,936,200	84.738.079	37,063,815	38,175,729	194.913.823		
	Meningkatnya Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan	Persentase Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Innovative Government Award Kabupaten Barito Kuala Secara Nasional		45	50	55	60		Bidang Litbang	
						2,597,856,763	749,999,585	564,999,572	631,949,560	650,908,046	2,597,856,763	Bidang Litbang	
			5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Kajian Yang Di Implementasikan		100%	100%	100%	100%		Bidang Litbang	
						1.398.928.559	399,999,970	307.499.786	340.974.780	350.454.023	1.398.928.559	Bidang Litbang	
			5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan Yang Terkelola Dengan Baik		7 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		Bidang Litbang	
						1.398.928.559	399,999,970	307.499.786	340.974.780	350.454.023	1.398.928.559	Bidang Litbang	
			5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Inovasi Yang Di Implementasikan		100%	100%	100%	100%		Bidang Litbang	
						1,464,267,839	349,999,615	257.499.786	290.974.780	300.454.023	1.198.928.204	Bidang Litbang	
			5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		Bidang Litbang	
						627,543,673	149,999,910	154,499,907	159,134,905	163,908,952	627,543,674	Bidang Litbang	
			5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil - Hasil Kelitbang		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		Bidang Litbang	
						836,724,166	199,999,705	103.000.000	131.839.875	136.545.071	571.384.651	Bidang Litbang	



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kinerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
							Terget / Pagu (Rp)	Terget / Pagu (Rp)	Terget / Pagu (Rp)	Terget / Pagu (Rp)	Terget / Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							5.731.081.430	6.359.206.525	5.582.087.924	5.763.008.527	23.435.384.406		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di dalam RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPD 2023 - 2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbang yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPD.

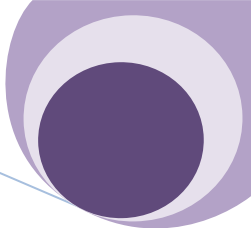
Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Bappelitbang berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati keempat misi pembangunan daerah, peran perencanaan dominan pada misi ketiga dengan target ***Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*** dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Capaian MCP Korsupgah KPK dapat terakomodir pada dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai misi utama. Namun secara keseluruhan ada peran perencanaan sebagai penunjang pada tiga misi lainnya guna menjalin terjadinya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah. Penjelasan terkait peran perencanaan terhadap keempat misi sebagai berikut :

1. Sebagai misi utama pada misi ketiga Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:
 - a. Terkait Reformasi Birokrasi adalah nilai sakin dari unsur perencanaan, dimana proses penyusunan dokumen perencanaan harus dilaksanakan oleh semua SKPD sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku
 - b. Terkait MCP Korsupgah KPK adalah pelaporan atas semua kegiatan proses perencanaan yang dilakukan dan di upload pada aplikasi MCP melalui admin inspektorat.
2. Sebagai penunjang pada misi satu adalah Capaian Indikator Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi.
 - Untuk capaian indikator kemiskinan dengan kegiatan rapat koordinasi untuk penanggulangan kemiskinan dengan SKPD terkait di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Menyusun SK Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, produk kelitbangan

- 
- Untuk pertumbuhan ekonomi terkait Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (PDRB) dan produk kelitbangan
3. Sebagai penunjang pada misi kedua adalah Ketimpangan Gini / Rasio
Dengan kegiatan rapat koordinasi terkait BKT dan Tata Ruang serta produk kelitbangan
 4. Sebagai penunjang pada misi keempat Indeks Pembangunan Manusia
Dengan kegiatan rapat koordinasi dan monitoring evaluasi terkait stunting, KLA, Kependudukan, Ramah Perempuan dan Peduli Anak, SDGs dan Kelitbangan.

Indikator Kinerja Bappelitbang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 7.1.

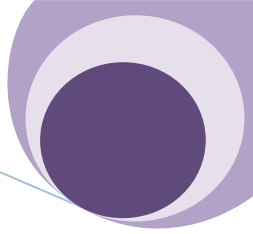
Indikator Kinerja Bappelitbang yang mengacu pada Tujuan RPD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (TAHUN 2023)	TARGET CAPAIAN Setiap Tahun				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Bappelitbang yang mengacu pada Sasaran RPD

No.	INDIKATOR	KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (TAHUN 2023)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
1	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan</i>	100	24,5	25,0	26,0	26,5	26,5



Tabel 7.3.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2023 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja.

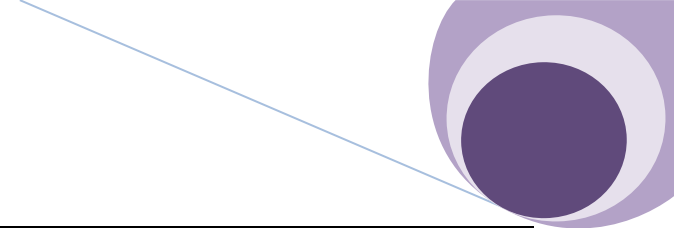
Tabel 7.4.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2023 - 2026

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)			
						2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan Kinerja	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja.	$\frac{\sum \text{Jumlah Keseluruhan TPK semua SKPD.}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	24,5	25,0	26,0	26,5

Tabel 7.4.
 Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026 (Revisi Pertama)

No	Tujuan	Indikator	Target				Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	70,94	72,94	74,94	74,94	Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten Dari Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Yang Diberikan Oleh Kemenpan RB	24,00	24,50	25,00	25,00
							Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten Dari Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Kabupaten	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Yang Diberikan Oleh Kemenpan RB	22,00	23,00	24,00	25,00
							Meningkatnya Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan	Persentase Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan : Jumlah Kajian Yang Disusun x 100	100	100	100	100



							Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbang	Nilai Evaluasi Sakip Bappelitbang	Hasil Evaluasi Sakip Oleh Inspektorat	80,00	81,00	82,00	83,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Revisi Kedua Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala periode 2023 - 2026 adalah pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbang untuk 4 (empat) tahun ke depan yang dapat dilakukan reviu secara periodik/pada kondisi tertentu. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, sumber pendanaan dan konsistensi serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappelitbang untuk melaksanakan Renstra sebaik-baiknya dengan menjabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang di lingkungan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2023 - 2026 setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/reviu muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Tujuan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala periode 2023 - 2026 yaitu ***Meningkatkan Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas.***

Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala periode 2023 – 2026 Revisi Kedua dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Bappelitbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak. Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala.

Hasil pelaksanaan Renstra Bappelitbang tahun 2023 - 2026 Revisi Kedua akan menjadi tolok ukur keberhasilan Bappelitbang yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) setiap periode, dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran terkait dengan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- bahwa : a. bahwa berdasarkan pasal 1 poin 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, agar SKPD menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
- b. bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten / kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJMN.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - h. BAB VIII : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANG) bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2023- 2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD dan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

**BAB IV
PERUBAHAN RPD**

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :
- a. Terjadi perubahan pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - d. terjadi perubahan yang mendasar;
 - e. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

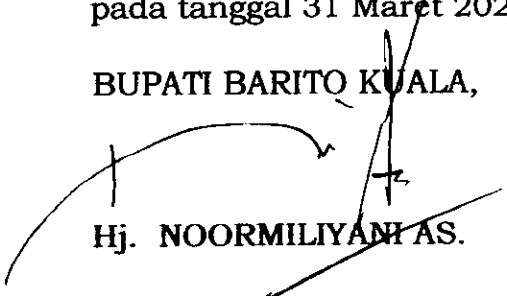
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI BARITO KUALA,


Hj. NOORMILIYAN AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 25

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas				Nilai Reformasi Birokrasi	88,06 Persen	88,12 Persen	88,24 Persen	88,36 Persen	88,48 Persen	88,48 Persen	0 Persen	88,48 Persen	88,48 Persen	0 Persen	88,48 Persen				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan			Nilai SAKIP Kabupaten Dari Unsur Perencanaan	24,5 Nilai	24,5 Nilai	25,0 Nilai	26,0 Nilai	26,5 Nilai	26,5 Nilai	0 Persen	100 Persen	1,040,409,672	0 Persen	100 Persen	0			
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan kabupaten yang ditetapkan	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	889,266,143	100 Persen	1,040,409,672	0 Persen	100 Persen	0			
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan SKPD Yang Ditetapkan	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	169,591,288	100 Persen	174,679,027	0 Persen	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA		
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	719,674,855	100 Persen	865,730,645	0 Persen	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA		
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Dikoordinir Penyusunannya	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	360,619,611	100 Persen	371,438,199	0 Persen	100 Persen	0			
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Batola Cerdas, Sehat, Berprestasi dan Berkinerja baik	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	106,089,873	100 Persen	109,272,569	0 Persen	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA		
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Batola Berdaya	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	106,089,883	100 Persen	109,272,580	0 Persen	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA		
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Batola Berkarya	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	148,439,855	100 Persen	152,893,051	0 Persen	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA		
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Innovative Government Award Kabupaten Barito Kuala Secara Nasional	0 Indeks	100 Indeks	90 Indeks	80 Indeks	70 Indeks	70 Indeks	631,949,560	80 Indeks	650,908,046	0 Indeks	70 Indeks	0			
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Data dan Informasi Pembangunan yang dipublikasikan	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	340,974,780	100 Persen	350,454,023	0 Persen	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA		
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi Daerah yang mendapatkan Predikat Inovatif	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	290,974,780	100 Persen	300,454,023	0 Persen	100 Persen	0	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Kuala

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan Sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk terciptanya pelayanan publik berkualitas				Akuntabilitas (Reformasi Birokrasi)	88,06 Persen	88,12 Persen	88,24 Persen	88,36 Persen	88,48 Persen	88,48 Persen	0 Persen	88,48 Persen							
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	100 Nilai	0 Nilai	100 Nilai							
		XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3,700,252,610	100 Persen	3,700,252,610	0 Persen	0	100 Persen	0		
		XXX01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	86,089,270	100 Persen	86,089,270	0 Persen	0	100 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA		
		XXX01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2,824,598,504	100 Persen	2,824,598,504	0 Persen	0	100 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA		
		XXX01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Kepegawaian	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	36,832,500	100 Persen	36,832,500	0 Persen	0	100 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA		
		XXX01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	344,191,980	100 Persen	344,191,980	0 Persen	0	100 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA		
		XXX01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	35,897,500	100 Persen	35,897,500	0 Persen	0	100 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA		
		XXX01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	189,284,456	100 Persen	189,284,456	0 Persen	0	100 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA		
		XXX01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	183,358,400	100 Persen	183,358,400	0 Persen	0	100 Persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA		